

MASALAH DAN TANTANGAN OPERASIONAL PERBANKAN DI INDONESIA

Suatu Tinjauan

*Kustivan Kamarga, S.H., M.B.A **

Yuli Purwanto, S.E

A. Tinjauan Industri Perbankan di Indonesia pada saat ini

Ditinjau dari porsi nilai aktiva dan jumlah jaringan kantor cabang bank terhadap nilai aktiva dan jumlah jaringan kantor cabang seluruh lembaga keuangan di Indonesia, akan terlihat bahwa kelem-

bagaan perbankan mendominasi Industri Keuangan dibandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan non bank, industri asuransi, industri leasing, dan lain-lain. Gambaran tersebut di atas terlihat dari tabel yang disajikan di bawah.

Sudah menjadi suatu kebijaksanaan

dan harapan pemerintah, sejak periode Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Tahap Pertama, sektor industri perbankan dapat lebih berperan bagi tercapainya pelaksanaan pembangunan nasional, berupa menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan untuk itu.

**Struktur dan Tingkat Laju Pertumbuhan Aktiva
Lembaga-lembaga Keuangan Indonesia
1982-1986**

	Jumlah		Aktiva Bruto (Rp triliun)		Rata-rata Aktiva Bruto (Rp triliun)		Persentase terhadap Total Seluruh Aktiva Lembaga Keuangan		Pertumbuhan Aktiva (% tahun)
	1982	1986	1982	1986	1982	1986	1982	1986	1982-1986
Bank Indonesia	1	1	13,7	34,5	-	-	43,1	38,4	20,3
Bank Komersial:	115	110	15,9	46,6	1,01	2,88	50,0	51,8	24,0
- Bank Devisa Nasional	15	15	12,7	36,8	0,84	2,45	39,9	40,9	23,7
- Bank Asing	11	11	1,2	2,7	0,11	0,25	3,8	3,0	17,6
- Bank Komersial Lainnya	61	56	0,7	3,6	0,01	0,06	2,2	4,0	38,8
- Bank Pembangunan a)	28	28	1,3	3,5	0,05	0,13	4,1	3,9	21,9
Lembaga Keuangan Non Bank	14	14	0,8	2,1	0,06	0,15	2,5	2,3	21,3
Bank Tabungan	3	3	0,5	1,9	0,17	0,63	1,6	2,1	30,6
Perusahaan Asuransi	83	100	0,7	3,0	0,01	0,03	2,2	3,3	33,8
Perusahaan Leasing	34	83	0,1	1,4	0,01	0,02	0,3	1,6	69,5
Lembaga Kredit Lainnya b)	5809	5789	0,1	0,4	0,00	0,00	0,3	0,4	32,0
Jumlah	6059	6100	31,8	89,9	0,01	0,01	100,0	100,0	23,1

Sumber: 1. Bank Indonesia, Statistik Keuangan Indonesia, berbagai edisi.

2. Departemen Keuangan, Laporan Direktorat Lembaga Keuangan tentang kegiatan perusahaan Perasuransian di Indonesia, berbagai edisi.

Catatan: a) Termasuk 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

b) Terdiri dari Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, dan Jawatan Pegadaian.

Untuk mendorong terciptanya iklim yang menunjang harapan dan kebijaksanaan pemerintah di atas, pemerintah telah melaksanakan berbagai kebijaksanaan penyesuaian secara bertahap, sesuai dengan tuntutan dan situasi serta kondisi perekonomian nasional. Berbagai kebijaksanaan penyesuaian tersebut telah menunjukkan hasil yang menggembirakan bagi jaringan perbankan Indonesia, hal mana telah menunjukkan perkembangan yang pesat, terutama setelah Pakto 1988, baik ditinjau dari segi kelembagaan maupun kegiatannya.

Dapat dikemukakan bahwa hingga akhir Juni 1994, jumlah bank umum telah bertambah sebanyak 113 bank (di luar Bank Perkerditan Rakyat), termasuk di antaranya 28 bank campuran, sehingga jumlah bank umum kini menjadi 237 bank. Sedangkan jumlah kantor bank telah bertambah dari 4.000 kantor bank hampir mencapai 6.000 kantor bank, demikian juga dengan kegiatan usaha perbankan itu sendiri menunjukkan perkembangan yang pesat di mana sampai April 1994 yang lalu, pertumbuhan total aset seluruh perbankan meningkat hampir empat kali lipat sehingga menjadi Rp292 triliun. Dalam kurun waktu yang sama, perbankan telah berhasil meningkatkan mobilisasi dana dan pemberian kredit masing-masing dari Rp38 triliun menjadi Rp162 triliun, dan dari Rp49 triliun menjadi Rp188 triliun (Sumber: Bank Indonesia).

Selain dari peningkatan jumlah Bank dan Kantor Bank serta kegiatan perbankan di Indonesia, produk-produk perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat, baik dalam rangka kegiatan mobilisasi dana maupun pembiayaan dunia usaha, juga berkembang dengan pesat dan semakin beraneka ragam. Di samping itu, telah terjadi peningkatan ragam produk-produk finansial yang pada dasarnya tidak merupakan usaha kegiatan perbankan secara konvensional, yang secara tidak langsung akan meningkatkan persaingan antarbank sendiri dan antarbank dengan lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya.

Perubahan peranan perbankan yang secara konvensional berfungsi utama sebagai lembaga perantara tampak pada:

1) Terjadinya pergeseran peran perbankan Indonesia dari *Financial Institution* (yang lebih menekankan pada

lembaga perantara) menjadi *Financial Service*. Sehubungan dengan semakin banyaknya perusahaan besar menggantikan dana kredit yang diperolehnya dari perbankan dengan dana-dana yang diperolehnya dari *go public* dan penerbitan surat berharga seperti obligasi dan *commercial paper*, maka perbankan tidak mungkin terlalu mengandalkan penghasilan melalui pemberian kredit belaka, karena dana-dana yang dihimpun akan menjadi semakin mahal dan sulit diperoleh, yang membawa akibat *spread* dari bunga kredit dibandingkan biaya dana menjadi tipis. Oleh karena itu, perbankan harus berusaha dapat mengembangkan jasa-jasa yang lebih bersifat *fee basis* yang merupakan *non-interest income*.

2) Bank akan lebih banyak membiayai operasinya dengan dana yang diperoleh pasar modal (melalui penerbitan obligasi dan atau *go public*) daripada pembiayaan operasional perbankan melalui deposito, giro dan tabungan. Dewasa ini bank-bank besar lebih cenderung membiayai operasinya dengan dana yang diperoleh dari *go public* dan atau melalui penerbitan surat-surat obligasi karena dana-dana tersebut lebih bersifat jangka panjang dan lebih stabil serta handal sifatnya dibandingkan dengan *core deposits* perbankan yang konvensional seperti deposito, giro dan tabungan.

Di samping kemajuan-kemajuan dan perubahan-perubahan di atas, industri perbankan, yang sedang mengalami persaingan usaha yang ketat, masih harus mengatasi berbagai permasalahan, seperti penanganan kredit bermasalah, serta penyelesaian proses konsolidasi, sebagai pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank, sesuai dengan ketentuan bank Indonesia.

Dalam kaitan dengan hal-hal tersebut di atas, peranan pemerintah akan semakin menonjol didalam rangka penegakkan (*enforcement*) dari ketentuan-ketentuan perbankan terutama berkaitan dengan kesehatan bank oleh Bank Indonesia, yang secara langsung atau tidak langsung akan berakibat banyaknya bank yang akan mengalami kesulitan untuk memenuhinya,

dan akhirnya akan mengambil langkah-langkah penyehatan melalui konsolidasi, ataupun melalui merger atau diakuisisi oleh bank lain yang lebih sehat. Bahkan bank-bank sehat yang masih tetap kecil dan yang merasa tidak akan mampu bersaing dengan bank-bank yang besar akan mengambil inisiatif untuk melakukan merger di antara mereka, dalam rangka menciptakan kondisi bank yang lebih besar, kokoh dan sehat serta profesional.

Peranan pemerintah tersebut di atas dapat dimaklumi, karena pada dasarnya pemerintah menghendaki:

- Pertama, secara khusus industri perbankan harus menjaga keamanan dan kesehatannya sendiri serta keamanan dan kesehatan sistem keuangan pada umumnya, sebab tanpa adanya keamanan dan kesehatan perbankan tidak mungkin masyarakat bersedia menerima perbankan sebagai lembaga penyimpan kekayaan maupun sebagai perantara atas transaksi keuangan.
- Kedua, industri perbankan merupakan industri yang bersifat strategis bagi pengalokasian sumber-sumber ekonomi untuk mewujudkan berbagai sasaran pembangunan nasional, sehingga dalam hal ini perbankan dapat dikatakan merupakan sarana/lembaga penunjang bagi Pemerintah untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional.
- Ketiga, iklim persaingan perbankan harus dipelihara sehingga terjadi iklim persaingan perbankan yang sehat. Melalui persaingan yang sehat, lembaga perbankan diharapkan berlomba untuk mengelola aktivitas perbankan secara lebih efisien dan efektif, misalnya dengan melakukan penurunan biaya intermediasi, dan mengurangi persoalan kredit bermasalah, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat suku bunga, tingkat *spreading* antara suku bunga kredit dengan biaya peng-himpunan dana, yang secara tidak langsung akan meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional melalui peningkatan kegiatan usaha nasabah. Di lain pihak, perbankan selalu dituntut untuk meningkatkan kinerjanya, saling bahu-membahu antarsesama anggota perbankan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan

integritas perbankan, sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan industri perbankan yang sehat.

B. Tantangan Industri Perbankan Indonesia di masa yang akan datang

Dari gambaran di atas, akan tampak bahwa dalam iklim usaha industri perbankan yang menjadi semakin kompleks dan penuh persaingan tadi, kemampuan manajemen perbankan dan kualitas profesionalisme sumber daya manusia perbankan yang tinggi, akan merupakan suatu unsur yang penting dan sangat menentukan keberhasilan dari perkembangan dan ketahanan usaha perbankan itu sendiri.

Profesionalisme di bidang perbankan bukan hanya sekadar pemahaman dan penguasaan aspek teknis perbankan tetapi juga mencakup penghayatan terhadap arti etika profesi bankir yang dilandasi dengan tanggung jawab, dalam rangka memelihara kepercayaan dan kepentingan masyarakat serta menunjang terciptanya perbankan nasional yang tangguh, sehat dan handal.

Secara spesifik teknis perbankan, manajemen harus berusaha menciptakan faktor-faktor sebagai berikut:

1) Keberhasilan dalam Mengelola Sistem Teknologi Informasi

Perbankan dituntut untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan kecepatan dan ketepatan transaksi perbankan dan untuk itu perbankan harus memanfaatkan teknologi informasi melalui sarana komputer yang pada saat ini berkembang dengan pesat dan terbukti menunjang usaha dalam peningkatan kecepatan dan ketepatan transaksi serta efisiensi, sehingga uang bisa berpindah secara cepat (termasuk informasi yang sedang terjadi pada saldo nasabah dapat diketahui secara cepat). Hal itu dapat menunjang kebutuhan nasabah dalam rangka memanfaatkan dananya secara optimal. Dan di lain pihak, manajemen bank dituntut untuk mengelola biaya secara efisien dan memperoleh laba dalam setiap transaksi serta dapat menetapkan harga transaksi yang wajar dan dapat diterima nasabah.

Di lain pihak, kecepatan dan ketepatan sistem informasi bagi manajemen akan sangat menunjang dalam hal pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

2) Keberhasilan Mengelola Aset dan Liabilitasnya

Manajemen bank harus memusatkan perhatiannya pada suatu permasalahan sentral dari bank, yaitu persoalan likuiditas dan rentabilitas (suatu persoalan yang kadang-kadang bertolak belakang, karena manajemen bank tidak hanya memikirkan profit yang tinggi, tetapi juga bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjaga posisi sehingga kewajiban/komitmen bank dapat selalu dipenuhi tepat waktunya).

Oleh karena itu, keberhasilan mengelola aset dan liabilitas akan menempatkan bank pada posisi yang memungkinkan kekayaan bank berkembang secara mantap dan bank akan tetap berada dalam posisi yang menguntungkan serta aman dalam risiko bisnisnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan dan perkembangan bank itu sendiri.

3) Keberhasilan Pemasaran

Dalam era industrialisasi seperti sekarang ini, perbankan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dalam menunjang pembiayaan investasi dan modal kerja dari nasabah serta sebagai lembaga perantara yang melancarkan arus uang setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Untuk itu pula industri perbankan dituntut untuk menentukan segmen pasar mana yang akan dilayani, diperkuat, dikembangkan pada masa yang akan datang, memperluas jaringan kerja, menciptakan dan mengembangkan produk-produk perbankan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabah, sehingga dalam hal ini bank akan lebih dapat berperan sebagai partner dan penasihat yang dapat melayani dan memenuhi kebutuhan nasabah.

Secara analogi, pola hubungan antara bank dan nasabah lebih merupakan hubungan seperti ikan dan air di mana

keduanya saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

4) Keberhasilan Perencanaan Strategis baik yang Bersifat Jangka Pendek maupun Jangka Panjang

Perbankan harus berbenah diri terhadap tujuan dengan memutuskan di mana dan ke mana arah perbankan di masa yang akan datang, menentukan tindakan apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan untuk itu diperlukan suatu analisis posisi bank pada saat ini dan posisi persaingannya (termasuk persaingan dari lembaga keuangan non bank) serta penentuan bentuk persepsi yang dikehendaki nasabah terhadap bank, dengan tidak mengabaikan aspek pertumbuhan dan perkembangan bank itu sendiri.

5) Keberhasilan dalam Mengelola Perubahan

Perbankan dituntut melakukan perubahan pola pemikiran dan tingkah laku manajemen dari sikap menunggu menjadi bersikap aktif dan progresif dalam arti harus selalu berpikir maju dengan mampu menjabarkan situasi ekonomi yang sedang berlangsung, dan mampu mengantisipasi ke depan serta melakukan beberapa penyesuaian dan pendekatan yang terarah dan yang diperlukan dalam rangka kemajuan dan kelangsungan hidup bank melalui usaha-usaha perbankan yang sehat dan pencapaian keuntungan secara wajar serta tidak mengabaikan aspek-aspek sosial dan kepentingan masyarakat.

* *Kustiwan Kamarga, SH, MBA adalah alumni Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, Angkatan 1987. Sekarang menjabat sebagai Direktur Muda ModernBank.*

Yuli Purwanto, SE adalah Staf ModernBank.